

STRATEGI PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Miftakhul Arif¹

¹STAI Fatahillah Serpong, Jl. Raya Puspiptek No.135, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: miftalmahbub@gmail.com

Article History

Received: 05-08-2025

Revision: 14-08-2025

Accepted: 16-08-2025

Published: 18-08-2025

Abstract. The purpose of this study is to analyze the strategy of the quality assurance system of Islamic higher education in improving the quality of institutions in the era of globalization and the industrial revolution 4.0. Quality assurance is seen as important as a quality control instrument in maintaining and developing the quality of education. This research uses a qualitative method with the type of library research. Data were obtained from scientific articles published in academic journals, research reports, and other related documents using documentation techniques. Data analysis was conducted through content analysis to evaluate the content of the collected literature. The results showed that the application of total quality management in education can encourage more effective and sustainable institutional change. In the context of higher education, assessment and accreditation that have been focusing on inputs and outputs can be improved through the application of total quality management that integrates inputs, processes, and outputs as a whole.

Keywords: Quality Assurance, Quality Control, Higher Education, Quality Improvement

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi Islam dalam meningkatkan kualitas lembaga di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Penjaminan mutu dipandang penting sebagai instrumen quality control dalam menjaga sekaligus mengembangkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research*. Data diperoleh dari artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademik, laporan hasil penelitian, serta dokumen terkait lainnya dengan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui *content analysis* untuk mengevaluasi isi literatur yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen mutu total dalam pendidikan dapat mendorong perubahan kelembagaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan tinggi, penilaian dan akreditasi yang selama ini berfokus pada input dan output dapat ditingkatkan melalui penerapan total *quality management* yang mengintegrasikan input, proses, dan keluaran secara menyeluruh.

Kata Kunci: Penjaminan Mutu, Pengawasan Kualitas, Pendidikan Tinggi, Peningkatan Mutu

How to Cite: Arif, M. (2025). Strategi Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu pada Lembaga Pendidikan Tinggi Islam. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (5), 8138-8147. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i5.4031>

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang, lembaga pendidikan tinggi Islam dituntut tidak hanya mempertahankan eksistensinya, tetapi juga meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Pendidikan tinggi Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral.

Dalam konteks globalisasi dan era revolusi industri 4.0, tuntutan terhadap kualitas lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan tinggi Islam, semakin tinggi (Yuliana & Rizal, 2020). Penjaminan mutu menjadi instrumen penting untuk memastikan kualitas pendidikan melalui fungsi *quality control* yang berlaku di lembaga pendidikan tinggi. Upaya menghasilkan lembaga pendidikan yang bermutu merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pendidik dan tenaga kependidikan. Masyarakat pun memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menuntut dan mendukung hadirnya lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas (Hidayat & Machali, 2012).

Lembaga pendidikan tinggi merupakan ujung tombak dalam pengembangan masyarakat melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, transformasi kelembagaan harus terus dilakukan agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan tinggi berkualitas tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi pembangunan bangsa. Menurut Matei dan Iwinska (2016), peran pendidikan tinggi mencakup empat hal utama: (1) memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi, (2) mendukung perkembangan demokrasi dan pembaruan sosial-politik, (3) memperkuat identitas bangsa, dan (4) meningkatkan reputasi negara di kancah internasional.

Berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Indonesia memiliki 4.739 perguruan tinggi, 279.480 dosen, dan 5.904.857 mahasiswa. Namun, besarnya jumlah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagian besar perguruan tinggi masih belum memiliki mutu yang baik, terlihat dari hasil akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), di mana jumlah perguruan tinggi terakreditasi A hanya 81, B sebanyak 751, dan C sebanyak 1.191 (BAN-PT, 2019). Selain itu, pemeringkatan pendidikan tinggi dunia seperti Times Higher Education (THE) dan Webometrics menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia masih jauh tertinggal. Universitas Indonesia (UI) yang menjadi universitas terbaik nasional hanya berada di peringkat 800-an dunia. Kondisi ini semakin memperlihatkan ketimpangan kualitas, terutama antara perguruan tinggi besar di Pulau Jawa dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di luar Jawa (Suwignyo, 2021). Dengan meningkatnya jumlah perguruan tinggi dan mahasiswa, kebutuhan akan strategi penjaminan mutu pendidikan tinggi yang lebih efektif menjadi semakin mendesak.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat pendidikan tinggi dunia seperti *Times Higher Education* (THE) dan *Webometrics*, perguruan tinggi Indonesia belum ada yang mampu menembus peringkat 100 besar dunia, bahkan di tingkat Asia. Universitas

Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia hanya menempati peringkat 800-an, yang sekaligus menggambarkan betapa rendahnya posisi perguruan tinggi lain, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Kondisi ini semakin menegaskan adanya kesenjangan antara kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan pertumbuhan jumlah perguruan tinggi dan mahasiswa yang semakin meningkat, disertai dengan tuntutan peningkatan mutu yang kian besar, diperlukan strategi penjaminan mutu yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi Islam dalam menghadapi tantangan global sekaligus memberikan rekomendasi penguatan mutu yang relevan dengan kebutuhan zaman.

METODE

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan jenis library research atau penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan berbagai jenis materi yang dikumpulkan peneliti melalui hasil bacaan yang bersumber dari dokumen, ensiklopedia, kamus, jurnal, majalah, buku, dan lain sebagainya (Mardalis, 1999). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal akademik, laporan hasil penelitian dan dokumen terkait lainnya. Sumber-sumber ini dipilih karena mengandung analisis mendalam tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumentasi, di mana peneliti menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pencatatan, pembuatan ringkasan, dan kutipan dari dokumen yang berhubungan dengan strategi manajemen pemasaran perguruan tinggi dan manajemen keuangannya di tengah kemajuan teknologi digital.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk mengevaluasi konten dari literatur yang dikumpulkan. Peneliti menganalisis data secara kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema utama, tren, konsep penting, serta kesamaan dan perbedaan dalam berbagai sumber yang dikaji. Data dianalisis untuk memahami sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. Untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber pustaka untuk melihat konsistensi dan validitas temuan. Selain itu, peneliti melakukan review kritis terhadap literatur yang dipilih, memastikan bahwa setiap sumber memiliki kredibilitas yang tinggi dan relevan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN DISKUSI

Mutu Satuan Pendidikan

Mutu pendidikan berdasarkan Undang-undang Sisdiknas nomor 2 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Mutu adalah kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh satuan produk atau jasa (*services*), yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan kepuasan (*satisfaction*) pelanggan (*customers*). Dalam dunia pendidikan, pelanggan dikelompokkan menjadi dua, yaitu *internal customer* dan *external customer*. Internal customer yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar (*learners*), dan external customer yaitu masyarakat dan dunia industri.

Mutu pendidikan merupakan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan dan dalam rangka mengembangkan bakat pelanggan (peserta didik) serta memenuhi standar akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh para pelanggan, sehingga mereka merasa puas terhadap pelayanan atau pun output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan (Hoy et al., 2025). Arti mutu dalam pendidikan agama Islam adalah fungsi dan peran pendidikan tinggi dalam menyeimbangkan antara proses dan hasil pendidikan yang pada akhirnya output peserta didik menjadi pribadi muslim yang berkualitas. Dalam arti, peserta didik mampu mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup dengan perspektif Islam. Pemahaman manusia berkualitas dalam konteks pemikiran Islam sering disebut sebagai insan kamil yang mempunyai sifat-sifat antara lain manusia yang selaras (jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi), manusia moralis (sebagai individu dan sosial), manusia nazhar dan i'tibar (kritis, berijtihad, dinamis, bersikap ilmiah dan berwawasan ke depan), serta menjadi manusia yang memakmurkan bumi (Muhaimin, 2005).

Untuk mengukur pendidikan yang berkualitas tentunya diperlukan kriteria/ indikator. Sallis mengungkapkan ada banyak indikator mutu yang baik di lembaga pendidikan. Antara lain: 1) *high moral values*; 2) *excellent examination results*; 3) *the support of parents, business and the local community*; 4) *plentiful resources*; 5) *the application of the latest technology*; 6) *strong and purposeful leadership*; 7) *the care and concern for pupils and students*; 8) *a well-balanced and challenging curriculum* (Sallis, 2005). Pandangan ini menjelaskan bahwa lembaga pendidikan yang bermutu dan baik harus memiliki: 1) menjunjung tinggi nilai-nilai moral; 2) hasil ujian yang sangat memuaskan; 3) dukungan dari orang tua, tempat usaha dan

lingkungan sekitar; 4) sumber daya yang melimpah; 5) penerapan teknologi terkini; 6) kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi yang jelas; 7) kepedulian dan perhatian terhadap peserta didik; 8) kurikulum yang seimbang dan relevan.

Sistem Penjaminan Mutu dan Ruang Lingkupnya

Penjaminan mutu pendidikan memiliki peran penting dalam manajemen pendidikan karena menjadi dasar peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi Standar Nasional Pendidikan, pemantauan mutu yang terbatas, pemetaan mutu yang belum terpadu, dan tindak lanjut hasil pendataan yang belum terkoordinasi (Munir, 2013). Menurut Vroeijenstijn (2002), penjaminan mutu merupakan perhatian berkelanjutan terhadap realitas untuk melakukan perbaikan, dengan tiga pertanyaan kunci: apakah kita melakukan hal yang tepat, dengan cara yang benar, dan mencapai tujuan yang benar. Artinya, penjaminan mutu adalah upaya sistematis untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan semua aspek pendidikan, mulai dari sarana prasarana, pengelolaan, kepemimpinan, hingga proses dan hasil belajar.

Penjaminan mutu dalam pendidikan Islam, mencakup komponen input, proses, produk, dan outcomes. Input meliputi siswa, guru, tenaga kependidikan, serta sumber daya lain. Proses mencakup manajemen, pengembangan budaya perguruan tinggi, pembelajaran, dan penilaian. Produk terkait dengan kualitas lulusan dan hasil yang dicapai perguruan tinggi sebagai sistem. Outcomes lebih menekankan relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dengan demikian, penjaminan mutu tidak hanya sebatas menjaga standar, tetapi juga memastikan kesesuaian pendidikan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan *stakeholders*. Dalam konteks perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) hadir untuk memastikan kepatuhan terhadap Standar Dikti secara menyeluruh dan berkelanjutan (Amir, 2016). SPM Dikti terdiri dari tiga subsistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME/akreditasi), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI dilaksanakan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Sedangkan SPME dilakukan melalui akreditasi oleh LAM atau BAN-PT untuk menilai hasil implementasi SPMI. Dengan mekanisme ini, diharapkan terbentuk budaya mutu yang menyatu dalam pola pikir, sikap, dan perilaku seluruh civitas akademika di perguruan tinggi.

Evaluasi Mutu Pendidikan sebagai Pilar Penjaminan Mutu Pendidikan

Evaluasi mutu di lembaga pendidikan Islam dilakukan dengan membandingkan tujuan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan dengan hasil pelaksanaan kegiatan. Evaluasi mencakup pengawasan saat program berjalan, evaluasi diri pada akhir kegiatan, serta penilaian dari auditor internal maupun eksternal. Evaluasi proses berfungsi sebagai pencegahan dan pengendalian agar program sesuai target, sementara evaluasi diri menjadi sarana bagi lembaga untuk menilai kekuatan dan kelemahan, menjamin kualitas pembelajaran, serta menyusun rencana kerja berbasis pengembangan berkelanjutan (Perawironegoro, 2023). Dalam praktiknya, evaluasi mutu mencakup berbagai aspek seperti akses dan layanan kepada pelanggan, kepemimpinan, sarana prasarana, efektivitas pembelajaran, kualitas peserta didik, tenaga kependidikan, hubungan eksternal, kesehatan organisasi, serta penerapan Standard Operasional Prosedur (SOP). Instrumen akreditasi juga menekankan pentingnya pencapaian mutu lulusan, kualitas proses pembelajaran, mutu guru, manajemen lembaga, serta pemenuhan sarana dasar pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sekolah perlu mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan yang menjadi tolok ukur minimum kualitas penyelenggaraan pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Sementara itu, pada pendidikan tinggi, evaluasi mutu didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yang mencakup standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga diwajibkan menyusun standar tambahan sesuai kebutuhan, seperti standar pengembangan universitas, pengelolaan dosen, tenaga kependidikan, hingga standar keuangan. Dengan demikian, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi memiliki instrumen penjaminan mutu masing-masing, namun semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu memastikan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Strategi Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjamin Mutu

Peningkatan kualitas perguruan tinggi dalam persaingan global memerlukan upaya berkesinambungan, mulai dari peningkatan kompetensi dosen, pengembangan program studi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, perbaikan kurikulum, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu, hingga penguatan kerja sama dengan berbagai pihak. Untuk mewujudkan hal tersebut, perguruan tinggi wajib menerapkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal. Penjaminan mutu ini

tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai sarana penguatan manajemen dan tata kelola agar kinerja institusi semakin baik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa standar dan model penjaminan mutu di pendidikan tinggi dapat berbeda-beda, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada model yang menitikberatkan pada tujuan, proses, kepuasan, legitimasi, maupun pembelajaran organisasi. Di Indonesia, implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi masih menghadapi tantangan karena belum semua perguruan tinggi memiliki dokumen standar yang lengkap. Namun, adanya regulasi seperti Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 memberi arah yang jelas bagi perguruan tinggi dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu.

Keberhasilan sistem penjaminan mutu sangat ditentukan oleh kepemimpinan, kesiapan menghadapi akreditasi, serta kerja sama antarperguruan tinggi. Perguruan tinggi juga perlu memiliki unit penjaminan mutu yang terintegrasi dalam manajemen, sehingga mampu memastikan seluruh aspek pendidikan berjalan sesuai standar. Dengan demikian, tujuan utama dari penjaminan mutu adalah mewujudkan perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) agar perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, memperkuat perannya dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, serta tetap relevan dengan tuntutan pembangunan nasional dan persaingan global.

Implementasi TQM dalam Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi

Penjamin mutu institusi pendidikan tinggi dalam strategi peningkatan kualitas dapat melalui beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut diantaranya adalah *Total Quality Management* (TQM). TQM adalah manajemen mutu terpadu yang dilakukan oleh setiap tingkat manajemen dan semua unit dalam sistem organisasi yang bertujuan untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan (Rabiah, 2019).

Secara praktis satuan pendidikan yang menggunakan indikator-indikator sasaran mutu dalam meningkatkan mutu pendidikan secara tidak langsung telah menggunakan TQM sebagai suatu nilai untuk meningkatkan standar pelayanannya. Untuk itu diperlukan sebuah konsep untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan sebagai sebuah upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan, baik dalam dimensi layanan jasa dengan menggunakan konsep TQM dengan berbagai versi (Simarmata et al., 2021). Konsep dan praktik TQM diperkenalkan pada 1980-an ke industri jasa, termasuk sektor pendidikan. Perkembangan TQM di bidang pendidikan terkait langsung dengan semakin ketatnya persaingan antar lembaga pendidikan,

khususnya perguruan tinggi di seluruh dunia dalam proses globalisasi yang semakin cepat (Nasim et al., 2020). Penerapan TQM dalam pendidikan memberi dampak yang sangat baik dalam keseluruhan sistem. Seperti yang dapat kita katakan bahwa penerapan manajemen mutu total dalam pendidikan dapat memastikan perubahan kelembagaan yang lebih efektif dan sukses. Teori yang diperoleh dari TQM yaitu perubahan lingkungan kelembagaan, keberhasilan yang berkelanjutan, dan inovasi yang mengungkapkan hubungan antara lembaga pendidikan dan peran manajemen kualitas total (Khan et al., 2018). Dalam pendidikan tinggi penilaian dan akreditasi berfokus pada input dan output, pendekatan TQM mengintegrasikan input, proses dan keluaran.

Penting untuk dicatat bahwa penelitian tentang penerapan TQM telah menarik perhatian para akademisi yang bekerja pada di pendidikan tinggi di negara-negara berkembang. Boyle dan Bowden menganggap pembelajaran siswa sebagai tujuan utama dalam peningkatan kualitas di perguruan tinggi (Khan et al., 2018). Hal ini sejalan dengan acuan utama pemerintah dalam menentukan mutu pendidikan berfokus pada standar kompetensi lulusan dan kompetensi lulusan digunakan sebagai dasar pengembangan seluruh srtandar yang telah ditetapkan. Proses belajar mengajar sebagai salah satu komponen utama untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas berpusat pada akademisi yang berkualitas (Yusoff et al., 2018).

Pendekatan TQM berfokus pada efektivitas peningkatan proses dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan peningkatan kualitas produk, kualitas layanan dan kualitas keseluruhan organisasi untuk memberikan solusi atau layanan terbaik kepada pelanggan. Prinsip utama manajemen mutu terpadu dalam pengelolaan pendidikan mencakup empat sasaran yaitu kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan. Implementasi TQM dapat dibagi menjadi 3 tahap (1) tahap persiapan, (2) tahap Perencanaan dan (3) tahap pelaksanaan (Fitriani et al., 2021). TQM kerangka kerja harus mencakup sumber daya yang dapat dimobilisasi dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas, seperti sumber daya fakultas, sumber daya fasilitas, sumber daya mahasiswa, dan sumber daya luar sebuah universitas. Penting untuk dicatat bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pelanggan dalam layanan pendidikan tinggi tetapi pemain aktif dalam penelitian dan keterlibatan dengan stakeholder. Penting untuk memperlakukan mahasiswa sebagai sumber daya input dan memobilisasi mereka untuk peningkatan kualitas. Dalam proses, kerangka kerja mencakup semua proses dan pengelolaan aktivitas, penelitian dan keterlibatan industri dengan pemangku kepentingan di luar universitas. Di sisi keluaran, kerangka kerja harus terlebih dahulu mempertimbangkan

kualitas hasil kegiatan TQM dan kemudian menghubungkan peningkatan kualitas di bidang-bidang lain dengan kinerja keseluruhan institusi pendidikan tinggi (Khan et al., 2018). Hal ini sangat penting untuk mengembangkan ukuran kinerja atau kualitas institusi seperti peringkat universitas, kepuasan mahasiswa, dan pekerjaan lulusan.

KESIMPULAN

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi dapat dicapai melalui penerapan sistem penjaminan mutu yang terdiri atas Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sesuai Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020. SPMI dilaksanakan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi, sedangkan SPME dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM. Keduanya bertujuan untuk memastikan standar mutu pendidikan tinggi tercapai melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Lembaga penjaminan mutu berperan dalam peningkatan, inovasi, komunikasi, motivasi, dan pengawasan, yang didukung oleh manajemen mutu melalui perencanaan strategis, kebijakan, prosedur, serta prinsip “kerjakan yang tertulis dan tulis yang dikerjakan.” Dengan penerapan Total Quality Management (TQM), perguruan tinggi dapat melakukan perubahan kelembagaan yang lebih efektif, meningkatkan akuntabilitas, serta menghasilkan kinerja institusi yang diukur dari peringkat universitas, kepuasan mahasiswa, dan kualitas lulusan.

REFERENSI

- Alzafari, K., & Ursin, J. (2019). Implementation of quality assurance standards in European higher education: Does context matter? *Quality in Higher Education*, 25(1), 58–75.
- Amir, M. F. (2016). *Manajemen kinerja perguruan tinggi*. Mitra Wacana Media.
- B., Jamoliddinovich, U. (2022). Fundamentals of education quality in higher education. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, 11(1).
- BAN-PT. (2019). *Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia*. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Cahyono, D., & Wekke, I. S. (2019). *Langkah demi langkah membangun penjaminan mutu perguruan tinggi*. Deepublish.
- Fadhli, M. (2020). Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal pada lembaga pendidikan tinggi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 132–143.
- Fitriani, W., L. P., & Kemenuh, I. A. A. (2021). Peningkatan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi melalui implementasi manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. *Pintu: Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(2), 45–56.
- Hadis, A., & Nurhayati. (2010). *Manajemen mutu pendidikan*. Alfabeta.
- Hidayat, A., & Machali, I. (2012). *Pengelolaan pendidikan: Konsep, prinsip, dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*. Kaukaba.
- Hoy, M., Jardine, C. B., & Wood, C. (2005). *Improving quality in education*. Falmer Press.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Pedoman umum sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, & Direktorat Penjaminan Mutu. (2018). *Pedoman sistem penjaminan mutu internal*.
- Khan, R., Khan, U., Khan, S., Aslam, S. M., Mateen, S., & Punhal, N. (2018). Total quality management in education. *International Journal of Science and Business*, 2(2), 1–14.
- Lim, D. (2018). *Quality assurance in higher education: A study of developing countries*. Routledge.
- Matei, L., & Iwinska, J. (2016). *Quality assurance in higher education: A practical handbook*. UNESCO-CEPES.
- Mardalis. (1999). *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara.
- Muhaimin. (2005). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Munir, A. (2013). Manajemen pembiayaan pendidikan dalam perspektif Islam. *Jurnal At-Ta'dib*, 8(2), 239–252.
- Paputungan, I., Ansar, A., & Mas, S. R. (2021). Keefektifan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. *Pedagogika*, 11(1), 12–23.
- Perawironegoro, D. (2023). *Manajemen mutu pendidikan Islam*. UAD Press.
- Prabowo, H., Farida, G., & Vidayanti, D. (2017). Implementing the quality assurance system in Indonesian higher education. *Aktual'ni Problemy Ekonomiky: Actual Problems in Economics*, 1(187), 257–266.
- Rabiah, S. (2019). Manajemen pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Sinar Manajemen*, 6(1), 23–34.
- Sallis, E. (2005). *Total quality management in education*. Kogan Page Limited.
- Seyfried, M., & Pohlenz, P. (2018). Assessing quality assurance in higher education: Quality managers' perceptions of effectiveness. *European Journal of Higher Education*, 8(3), 258–271.
- Simarmata, P., Hidayatulloh, H. M., Revida, A. N., Hasibuan, E., Komariyah, A., Kuswandi, I., Hutabarat, S., Purba, M. L. P., Firdaus, S., & Tjiptadi, D. D. (2021). *Organisasi: Manajemen dan kepemimpinan*. Yayasan Kita Menulis.
- Supadi, M. P. (2021). *Manajemen mutu pendidikan*. UNJ Press.
- Stukalo, N., & Lytvyn, M. (2021). Towards sustainable development through higher education quality assurance. *Education Sciences*, 11(11), 679–690.
- Suwignyo, A. (2021). Higher education quality in Indonesia: Challenges and opportunities. *Indonesian Journal of Higher Education Studies*, 5(2), 45–57.
- Tim Redaksi Siar Grafika. (2007). *Undang-Undang Sisdiknas 2003*. Sinar Grafika.
- Vroeijenstijn, T. (2002). Quality assurance in Europe: Background and the state of arts. Makalah disampaikan pada Seminar *On Quality Assurance in Higher Education*, Yogyakarta, 18–19 Juli.
- Yuliana, E., & Rizal, S. (2020). Tantangan pendidikan tinggi Islam di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 15–28.
- Yusoff, H., Baba, J., Ariffin, S., & Embong, R. (2018). Quality academics in higher education: Mapping the key components. *International Journal of Asian Social Science*, 8(11), 1052–1063.